



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 19 November 2021

Halaman: 1

PERATURAN PEMERINTAH JADI PATOKAN TENTUKAN KENAIKAN Hari Ini UMP dan UMK DIY Diumumkan, Kemungkinan Besar Naik

YOGYA (MERAPI) - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022 di Provinsi DIY diumumkan Jumat (19/11). Besar kemungkinan jumlahnya akan naik dari tahun sebelumnya mengingat pertumbuhan ekonomi di DIY cukup positif.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X telah mengadakan pertemuan dengan Bupati/ Wali Kota dan pihak terkait dalam menetapkan upah pada Kamis, (18/11).

"Jadi rapat hari ini memaparkan hasil (penghitungan) dewan pengupahan di Kabupaten/Kota. Dari situ Pak Gubernur akan segera memutuskan UMP dan UMK atas masukan tadi. Tapi rencananya besok akan diumumkan langsung oleh Gubernur," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Baskara Aji, Kamis (18/11) di Kantor Gubernur DIY.

Aji tidak menyebutkan berapa kenaikan upah UMP dan UMK di DIY. Meski begitu dia mengatakan tetap akan mengalami kenaikan mengingat kondisi pertumbuhan ekonomi DIY dinilai cukup bagus.

Aji mengatakan penetapan kenaikan upah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) * Bersambung ke halaman 9



Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Baskara Aji

Hari Ini

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Pada Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan dua hal yang dijadikan formula penghitungan UMP dan UMK yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

"Kenaikan kan dasarnya per-

tumbuhan ekonomi atau inflasi dan dua-duanya kita positif, kan penambahannya unsur utamanya pilih yang paling gede (besar). Kita kan 4,6 persen untuk pertumbuhan ekonomi kalau inflasi 1,5 persen," jelasnya.

Aji menilai rumusan penghi-

tungan UMP dan UMK kali ini dinilai lebih bagus sebab dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah, bukan menggunakan acuan pertumbuhan ekonomi Nasional.

"Rumusan sekarang saya kira bagus untuk DIY karena dulu itu yang dipakai pertum-

bahan ekonomi nasional dan angka inflasi nasional. Sekarang sangat mungkin kita menyalip provinsi lain karena penentuan UMP bergantung dari kinerja ekonomi masing-masing provinsi," jelasnya.

(C-4).

Sambungan halaman 1

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005